

KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN MALUT TEMUI WAKIL WALIKOTA TIDORE, MANTAPKAN LANGKAH KOLABORASI

Jum'at, 21 Maret 2025 - malut

Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku Utara, Iriyani Abd. Kadir melakukan audensi dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang diterima Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, di ruang kerjanya, Kamis, 20 Maret 2025.

Iriyani, dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang telah bersedia menyempatkan waktu untuk menerima kedatangan pihaknya bersama rombongan.

"Kunjungan ini salah satunya untuk bersilaturahmi sekaligus melakukan koordinasi untuk memperkuat kerja sama," kata Iriyani.

Berkaitan dengan koordinasi ini, kata ia, merupakan tuntutan dari Undang-undang, di mana Ombudsman harus lebih memantapkan langkah untuk bersinergi dan berkolaborasi.

"Sebagai pengawas eksternal tentunya kami diberikan ruang untuk proses pendampingan dan juga edukasi terhadap masyarakat yang tak luput dari inovasi dan kreatifitas. Maka dari itu dituntut untuk terus memperkuat kerja sama ini," katanya.

Iriyani menyebut ada beberapa catatan berkaitan dengan laporan atau aduan masyarakat di unit pelayanan pada tahun sebelumnya. Untuk itu, perlu dilakukan pendekatan persuasif agar bisa diselesaikan dalam jangka waktu cepat.

Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman menambahkan, pertemuan dengan Ombudsman Maluku Utara ini, bisa menjadi wadah untuk terus bersilaturahmi dan saling memberikan masukan kepada pemerintah daerah.

"Saya meminta kepada teman-teman dari Ombudsman, bisa saling memberikan masukan kepada kami. Sebagai Wakil Wali Kota, jika tidak disampaikan kepada Wali Kota, bisa langsung sampaikan kepada saya agar saling mengingatkan untuk berlaku adil dalam memberikan pelayanan kepada publik," paparnya.

Menanggapi laporan aduan tersebut, ia bilang, akan segera menindaklanjuti untuk mengidentifikasi setiap masalah atau aduan yang diterima, kemudian sedikit demi sedikit melakukan perubahan.

Pada prinsipnya, mindset kita harus berubah, terutama setiap fasilitas publik yang dibuat, harus betul-betul bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan hak-haknya yang dipenuhi.